

RINGKASAN

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2023



 **JOMBANG**
SANTRI

I. PENDAHULUAN

Penyusunan RKPD tahun 2023 telah mengakomodir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang mana dengan adanya kebijakan nasional tersebut diharapkan sinkronisasi dan keselarasan arah kebijakan serta monitoring dan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan beberapa hal tersebut, tema tahunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang, perlu dilakukan adaptasi. Tema pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2023 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sektor Unggulan”**. Dengan mengusung 4 (empat) prioritas pembangunan daerah tahun 2023 antara lain: (1). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum, (2). Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang berkarakter, berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan Ekstrem, (3). Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah, dan (4). Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Tahun 2023 adalah untuk:

1. Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgetting*), pelaksanaan (*executing*), serta pengendalian dan evaluasi (*monitoring and evaluating*) pembangunan yang terukur;
4. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Jombang dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi maupun Pusat.

II. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2023

Dua perubahan indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan daerah kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang 2018 – 2023. Dua Indikator tersebut adalah Indeks Reformasi Birokrasi menjadi Indeks Good Governance dan Tingkat kemiskinan menjadi Indeks Gini. Dari 6 (enam) tujuan dengan 6 (enam) indikator tujuan

Pemerintah Kabupaten Jombang hasil pengukuran pencapaian indikator tujuan pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023, diketahui bahwa 4 (empat) Indikator sudah melebihi 100 % dan dua indikator lainnya dalam kategori kurang. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 99,85 % atau bermakna Berhasil. Jadi capaian kinerja Tujuan Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2021 dapat dikategorikan Berhasil.

Dari 15 (lima belas) sasaran dengan 20 (dua puluh) indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Jombang hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 15 sasaran yang mencakup 20 indikator sasaran, diketahui bahwa 1 indikator sasaran dengan realisasi tidak sesuai target, hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 .Secara keseluruhan capaian kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2021 dapat dikategorikan **Berhasil**.

III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut, akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Tahun 2023 merupakan tahun untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,9%

Arah kebijakan keuangan daerah disusun berpedoman pada arahan kebijakan Pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi utamanya untuk pemenuhan alokasi anggaran yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan serta sinergitas kebijakan nasional maupun provinsi dengan kebijakan daerah yang dituangkan dalam Program dan kegiatan. Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2018-2023, tidak terlepas dari kemampuan keuangan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber -sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR).

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan yang setiap tahunnya dalam RKPD Kabupaten Jombang termasuk pada Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
3. Meningkatnya Profesionalitas Pegawai
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik
5. Meningkatnya Derajat Pendidikan
6. Meningkatnya Derajat Kesehatan
7. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
8. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketenteraman, Keamanan, Ketertiban Umum dan Kesadaran Berbudaya
9. Meningkatnya Investasi Daerah
10. Meningkatnya Keberdayaan Desa
11. Meningkatnya Kunjungan Wisata
12. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
13. Meningkatnya Infrastruktur Pendukung dan Daya Saing
14. Menurunnya Tingkat Pengangguran
15. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
16. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman

Tema "**Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan**". yang dijabarkan kedalam 4 (empat) prioritas pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Indikasi kegiatan yang menjadi prioritas yakni:

- Peningkatan pelayanan Publik
- Perluasan layanan Digitalisasi Desa Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peningkatan Inovasi dan Profesionalisme ASN
- Peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- Persiapan untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2023
- Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Penyusunan Rancangan Teknokratik (RPJPD) Tahun 2025-2045

2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang berkarakter, berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan Ekstrem. Indikasi Kegiatan yang menjadi prioritas yakni :

- Pemberian kain seragam sekolah dan buku-buku untuk SD/MI, SMP/MTS baik negeri maupun swasta.
- Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

- Pembentukan Sekolah Penggerak (PAUD,SD,SMP)
- Fasilitasi Sekolah Inklusi
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah
- Kurikulum sekolah berbasis digital
- Peningkatan Sekolah Keluarga
- Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pendidik
- Pendidikan Karakter (Mulok)
- Insentif bagi Guru Ngaji, Hafidz dan Hafidzah
- Penurunan Stunting (Berkadang)
- Penyediaan Pelayanan Ibu dan Anak (Berkadang)
- Pencegahan dan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Perlindungan anak
- Peningkatan Layanan Sosial
- Pencapaian sanitasi 100 % dan 0% Kawasan Kumuh (diakomodasi dalam MCK Jombang Berkadang).
- Penanganan Drainase, Sampah dan Limbah dan Air Bersih pengentasan kemiskinan Ekstrem
- Fasilitasi Alat Bantu Bagi Disabilitas
- Fasilitasi bersih desa/tasyakuran desa/PHBN/PHBA

3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah
Indikasi Kegiatan yang menjadi prioritas yakni :

- Peningkatan dan rehabilitasi jalan terutama menuju pusat-pusat sentra ekonomi
- Rehabilitasi drainase/trotoar Jalan
- Pemberantasan hama dan penyakit pertanian khususnya tikus
- Fasilitasi pemasaran serta pelatihan bagi Usaha mikro dan IKM untuk meningkatkan nilai tambah produk
- Penguatan modal bagi BUMDes (Berkadang)
- Peningkatan produksi/produktivitas dan pemasaran hasil perikanan, peternakan serta pertanian
- Jaminan ketersediaan pupuk (Berkadang)
- Revitalisasi pasar
- Fasilitasi sarana usaha bagi kepala rumah tangga miskin perempuan (Berkadang)
- Pembangunan,Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi
- Mendorong terwujudnya kualitas dan kemandirian strategis bagi pondok pesantren
- Pengembangan hasil-hasil produk unggulan daerah

- Pengembangan Infrastruktur pendukung kawasan industry
- Pengembangan kawasan pariwisata

4. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup

Indikasi Kegiatan yang menjadi prioritas yakni :

- Normalisasi sungai (Program Resik Kaliku)
- Jombang Peduli Sampah, melalui Penyediaan TPS-3R di beberapa desa dan pondok pesantren (diakomodasi melalui program prioritas kecamatan)
- Peningkatan kapasitas Daerah untuk penurunan risiko bencana.

IV. RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN DAERAH

Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2023 disusun dengan memperhatikan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan dalam musrenbang serta memperkuat sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing (Jombang Berkadang). Jombang Berkadang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023.

VI. PENUTUP

RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA dan PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta penyusunan RAPBD Kabupaten Jombang Tahun 2023, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Daerah sangat tergantung pada semua pihak, tidak hanya penyelenggara pemerintahan tetapi peran serta aktif dari masyarakat, sehingga diharapkan mampu untuk menjawab peluang dan kesempatan yang ada, agar dapat meminimalisir permasalahan yang muncul sebagai tantangan dan hambatan di masa mendatang. Selain itu juga bagi Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sedangkan dalam pelaksanaannya diharapkan masyarakat ikut mengawasi dan sekaligus berpartisipasi dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.